

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Studi Hubungan Internasional adalah disiplin ilmu yang membahas tentang dinamika peristiwa-peristiwa dalam Hubungan Internasional secara dinamis melalui penggunaan metode dan teori sesuai dengan perkembangannya. Hubungan Internasional membahas tentang politik internasional yaitu mengenai hubungan politik antar bangsa dalam hal peperangan, diplomasi, hubungan perdagangan, aliansi, partisipasi dalam organisasi internasional, pertukaran budaya, dan lain lain (HADIWINATA, 2017). Dinamika Hubungan Internasional pasca berakhirnya perang dingin banyak melahirkan persoalan baru, dan bertransformasi secara signifikan. Isu-isu tersebut juga berdampak pada dunia internasional.

Hubungan Rusia dan NATO sudah memanas sejak Perang Dingin dan menjadi rival hingga saat ini. Karena negara-negara adidaya (*super power*) yang mempunyai sistem pertahanan menempati posisi terkuat dalam mempengaruhi sistem politik internasional yang dapat mempengaruhi kesepakatan dalam kepentingan nasionalnya (Rahyuni & Pertahanan, 2012). Dimana setiap negara berusaha untuk menggapai kepentingannya yaitu dengan cara meningkatkan kekuatan nasionalnya. Rusia yang dianggap sebagai ancaman kekuatan bagi NATO dan NATO yang dianggap sebagai ancaman kedaulatan bagi Rusia.

Uni Soviet dahulu adalah negara yang termasuk ke dalam negara yang mempunyai fasilitas terbesar senjata nuklir di dunia. Rusia sebagai pewaris yang dianggap sah dari Uni Soviet ingin mengembalikan persatuan negara-negara

pecahan Uni Soviet dan Ukraina condong ke arah negara-negara Barat (Sani De Ornay & Azizah, 2022). Dan NATO (*North Atlantic Treaty Organization*) adalah organisasi aliansi militer pertahanan regional Atlantik Utara yang dibentuk tepatnya pada 4 April 1949 (Andrian, 2012). NATO yang beranggotakan Amerika Serikat, Iceland dan Kanada serta negara-negara Uni Eropa.

Konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina bukan pertama kali terjadi, konflik keduanya mulai muncul pada tahun 2006 terjadi karena Ukraina gagal dalam mengatasi hutang kepada Rusia dan menyebabkan Rusia menghentikan distribusi gas yang membuat kekacauan di wilayah Eropa. Padahal Rusia merupakan negara penting bagi Uni Eropa karena sumber gas alam yang menunjang kehidupan masyarakat Uni Eropa berasal dari Rusia. Uni Eropa menuduh Rusia sengaja memutus suplai gas alam ke Eropa lewat Ukraina. Padahal kenyataannya adalah adanya korupsi anggaran yang berlebihan yang terjadi di Ukraina terkait dengan manajemen distribusi gas alam yang berasal dari Rusia ke sebagian besar Uni Eropa (Farid et al., 2022).

Pada tahun 2014, telah terjadi kebangkitan besar-besaran di Ukraina sebagai upaya untuk menggulingkan Presiden Victor Yanukovich. Dimana kemenangan Presiden Victor Yanukovich diperoleh dari dukungan penuh Rusia. Karena Presiden Victor Yanukovich berhasil membatalkan Ukraina untuk bersekutu dengan NATO dan hendak mengembalikan Republik Ukraina ke dalam wilayah Federasi Rusia. Namun hal tersebut mendapat pengecaman dari wilayah barat Ukraina yang ingin Ukraina bergabung dengan wilayah Uni Eropa. Pasca peristiwa tersebut Rusia menganggap hal tersebut sebagai aksi penghinaan dan mencoreng

pemerintahan Rusia. Akibatnya Rusia melakukan aneksasi wilayah Krimea dalam kurun waktu satu bulan sebagai respon peristiwa tersebut (Farid et al., 2022)

Menanggapi pelanggaran yang dilakukan oleh Rusia, Uni Eropa menerapkan sanksi ekonomi sebagai sikap agar Rusia mengubah kebijakan luar negerinya. Mayoritas negara anggota Uni Eropa dengan erat telah membentangkan hubungan kerjasama ekonomi serta politik dengan Rusia. Namun, karena tindakan yang dilakukan Rusia dalam menganeksasi wilayah Krimea, sehingga Uni Eropa menjatuhkan sanksi kepada Rusia. Adapun Uni Eropa memberikan bantuan dana kemanusiaan baik kepada Ukraina, serta terhadap orang-orang yang paling berisiko terkena dampak dari konflik di wilayah Donetsk dan Lugansk sebagai upaya dalam menanggulangi konflik di Krimea (Fahmi, 2020),

Fokus Uni Eropa yaitu pada mitigasi krisis dan juga mendukung seluruh warga negara Ukraina dalam menciptakan situasi yang aman, damai, dan demokratis. Uni Eropa menjatuhkan sanksi ekonomi melalui Keputusan Dewan 2014/512/CFSP Pada tanggal 31 Juli 2014, Uni Eropa menjatuhkan sanksi ekonomi. Kemudian, para pemimpin Jerman, Prancis, Rusia dan Ukraina menyepakati perjanjian pada 12 Februari 2015 untuk menghentikan perang di Ukraina Timur atau dikenal dengan peristiwa *Minsk Agreement II* (Fahmi, 2020)..

Perjanjian tersebut, meliputi gencatan senjata di wilayah Ukraina Timur, dimulai sejak 15 Februari 2015 disertai dengan penarikan senjata berat. Uni Eropa melihat implementasi lengkap dari perjanjian *Minsk Agreement* dalam menyelesaikan konflik Krimea Rusia diakui sangat bergantung terhadap pasar di Kawasan Eropa, ekspor Rusia ditujukan ke Uni Eropa sebesar 45%. Kemudian, lebih dari separuh anggaran Rusia didapat dari hasil penjualan minyak dan gas ke

wilayah Uni Eropa. Sebaliknya Uni Eropa, hanya menyubstitusi sebesar 9,7% dari perdagangan total yang dilakukan Uni Eropa dengan Rusia (Fahmi, 2020).

Pada Februari 2022, konflik Rusia-Ukraina mulai memanas Kembali. dimana Presiden Vladimir Putin secara resmi mengumumkan invasi militer dengan mengerahkan pasukan militer dan armada tempur milik Rusia yang digerakkan di perbatasan Ukraina secara *massive*, yaitu di beberapa kota Ukraina. Alasan Rusia mengambil sikap tegas melakukan invasi militer karena tidak ada pilihan lain untuk melindungi kedaulatan negaranya dari bahaya pemerintahan Ukraina saat ini. Dan Langkah tersebut diambil karena Rusia tidak menginginkan segala bentuk aktivitas NATO melintasi wilayah Rusia, hal tersebut dianggap sebagai bentuk bahaya terhadap kedaulatan Rusia. Rusia dengan kekuatannya memaksa Ukraina untuk tidak mengesahkan perdagangan dengan Uni Eropa dan juga memaksa Ukraina untuk membatalkan tujuannya untuk tidak berintegrasi menjadi bagian dari pakta pertahanan NATO (Sani De Ornay & Azizah, 2022).

Menurut perspektif negara anggota NATO, Jika ada yang menginvasi negara anggota NATO, maka semua anggota NATO akan turun tangan membantu negara itu. Sesuai dengan Pasal 5 (lima) dalam Konstitusi NATO, yang berbunyi sebagai berikut:

"Serangan bersenjata terhadap satu atau lebih dari mereka akan dianggap sebagai serangan terhadap mereka semua" dan bahwa setelah serangan itu, semua negara yang tergabung dalam perjanjian tersebut masing-masing akan mengambil tindakan yang dianggap perlu, termasuk penggunaan kekuatan bersenjata. (Andrian, 2012)

Dasar konstitusi tersebut merupakan pijakan bagi NATO dalam menjelaskan jika ada serangan bagi anggotanya maka setiap anggota secara pribadi memiliki hak untuk membela diri. Eskalasi pada hubungan Rusia-Ukraina yang terjadi tidak bisa dilihat dari tindakan Rusia yang memicu krisis di Ukraina saja, tetapi dengan anggota NATO seperti negara-negara Uni Eropa dan AS. Alasan Rusia sebagai sebuah ancaman bagi NATO, karena peningkatan kekuatan militer yang dilakukan oleh Rusia sangat cepat untuk bisa menduduki kawasan Eropa Timur. Dan bagi Rusia NATO adalah ancaman bagi keamanan dan pertahanan negaranya.

Penyebab ketegangan antara Rusia dan Ukraina adalah langkah perluasan NATO yang menyebabkan konfrontasi kekuatan antara Barat dan Rusia, yang masuk ke wilayah Eropa Timur akan berpengaruh buruk bagi keamanan di Eropa Timur karena adanya dua negara adidaya (*super power*) yang saling berebut pengaruh dan akan menyebabkan ketidakstabilan dalam hubungan internasional antara negara-negara Eropa (Sani De Ornay & Azizah, 2022). Tindakan tersebut secara langsung memberikan dampak pada keamanan dan stabilitas global, sehingga mengundang berbagai pihak lain dalam tatanan dunia internasional untuk menawarkan respon terhadap invasi yang telah dilakukan Rusia kepada Ukraina (Fahmi, 2020).

Adanya ketergantungan Eropa kepada NATO, karena sebagai organisasi yang melindungi negara-negara yang berada dalam Uni Eropa (Yakti, 2018). Uni Eropa (*European Union*) ingin memberikan sanksi dengan melakukan embargo ekonomi dan juga embargo minyak mentah terhadap Rusia sebagai satu bentuk protes bersama para politisi, perusahaan dan juga gerakan separatis yang berasal dari Ukraina serta adanya dukungan NATO atas kebijakan Embargo Ekonomi Uni

Eropa terhadap Rusia. Agar perekonomian Rusia terguncang dan Rusia menghentikan aksinya untuk tidak melakukan invasi militer lagi ke Ukraina (Dewi & Siregar, 2017).

Pasca Rusia melakukan invasi militer ke Ukraina, Uni Eropa mendapati dirinya berada dalam trilemma (Constanze Stelzenmuller, 2022). Menurut *Factsheet on EU Restrictive Measures*, sanksi Uni Eropa tersebut menjadi tindakan hukuman agar dapat membawa perubahan terhadap politik Rusia. Sanksi ini bertujuan untuk meminimalisir dampak konflik Rusia-Ukraina yang terjadi (Mahfud Massaguni, Muhammad Nasir Bedu, 2022). Uni Eropa menggunakan sanksi ekonomi untuk membuat kerugian pada Rusia, dimana kerugian tersebut diharapkan membuat Rusia merubah kebijakannya yang dianggap tidak sesuai oleh negara yang memberi sanksi (Dewi & Siregar, 2017).

Adanya kebijakan embargo energi ini membuat banyak negara-negara Uni Eropa khawatir akan mengalami kekurangan energi, karena Uni Eropa sangat bergantung terhadap pasokan energi dari Rusia (Ro & Hanifah, 2017). Kemudian untuk bangkit dengan menanggapi sanksi ekonomi yang dijatuhkan Uni Eropa Rusia mencari cara (Dewi & Siregar, 2017). Rusia merespon sanksi tersebut dengan melakukan pelarangan ekspor lebih dari 200 produk asal Rusia, pelarangan pembayaran bunga terhadap investor luar yang melindungi obligasi milik pemerintahan Rusia, pelarangan perusahaan Rusia membayar saham pemegang saham asing, pelarangan investor luar yang mempunyai milyaran saham untuk menjual sahamnya, serta menghentikan pasokan energi ke Uni Eropa (C. Krisna et al., 2022).

Hal ini membuat pasokan energi mengalami hambatan ke Uni Eropa terutama ke Italia dan Jerman. Bahkan hampir setengah impor gas yang diterima Uni Eropa berasal dari Rusia. Selain itu importir gas Rusia di Uni Eropa adalah Prancis, Polandia, Slovakia, Austria, dan Republik Ceko sekitar lebih dari 5 miliar meter kubik per tahun (Mahfud Massaguni, Muhammad Nasir Bedu, 2022). Jika Rusia tetap melakukan invasi, maka akan menyebabkan ketidakstabilan untuk Eropa dan berhubungan dengan situasi keamanan di wilayah Eropa. Sedangkan negara-negara di Eropa mendapatkan pasokan energi melalui impor yang disuplai dari Jerman, disisi lain Jerman merupakan bagian dari Uni Eropa yang sangat berpengaruh dan termasuk ke dalam anggota NATO.

Sebelum embargo, Jerman adalah salah satu negara Uni Eropa yang paling tergantung pada impor energi dari Rusia. Jerman melakukan kerjasama bilateral dengan Rusia pasca Perang Dunia II, yaitu melalui perdagangan dan suplai energi dengan Rusia agar bisa memenuhi konsumsi energi di negara-negara Uni Eropa. Dalam *Ostpolitik*, Jerman berpendapat bahwa jika Jerman serta negara-negara Uni Eropa lainnya menjadikan Rusia sebagai rekan, maka stabilitas Eropa hanya bisa diwujudkan. Berdasarkan persepsi tersebut, Jerman menggandeng Rusia sebagai mitra dagang strategis di Eropa. Dalam *Ostpolitik* mengenai Rusia, Jerman juga menitikberatkan adanya transmisi pengetahuan, melakukan pekerjaan bersama, seminar, dan juga training bersama dalam bidang yang mencakup kesehatan, demografi, efisiensi energi, infrastruktur, edukasi serta training dan juga kerjasama berdasarkan regulasi (Zetira Kenang Kania, 2014).

Hubungan Jerman-Rusia tentu saja telah menjadi hal yang paling jauh jangkauannya untuk Eropa Barat: Pada 1990-an dan 2000-an, lembaga bilateral

Jerman-Rusia didominasi oleh paradigma liberalisme yaitu asumsi "saling ketergantungan", yang diterjemahkan ke dalam model bisnis kerja sama yang semakin erat di sepanjang rantai nilai gas alam transnasional melalui pertukaran aset dan kesepakatan *quid-pro-quo*. Kesepakatan paket yang paling menonjol termasuk pembangunan pipa *Nord Stream* melalui Laut Baltik. Secara paralel, BASF Wintershall dan E.ON Ruhrgas Jerman terlibat dalam produksi gas dan gas kondensat di Siberia barat, sedangkan 44 Eurogas (Gusev & Westphal, 2015).

Meskipun Jerman mengeksport sejumlah besar produk manufaktur dan teknologi ke Rusia, namun tergantung pada impor minyak mentah dan gas alam dari negara tersebut. Jerman juga merupakan pembeli utama Gazprom, dan penyimpanan gas terbesar Gazprom sebagian besar berada di bawah tanah di Eropa (Constanze Stelzenmuller, 2022). Mengingat Pasokan energi merupakan kebutuhan primer bagi Jerman, karena dapat dilihat dari periode ke periode konsumsi energi Jerman mempunyai kebutuhan energi terbesar dibandingkan negara lain. Pada tahun 2018, Jerman menduduki posisi ke Sembilan sebagai negara dengan konsumsi energi terbesar. Dan peningkatan energinya terlihat dari 2014-2017, dan mengalami penurunan di tahun 2018. Tingginya tingkat konsumsi tersebut terlihat dari data impor energi Jerman yang mengalami kenaikan dari tahun 2014 sampai tahun 2018. Dari sanalah dapat dikatakan bahwa energi merupakan kebutuhan primer bagi Jerman.

Konflik yang terjadi di Ukraina berdampak besar bagi Jerman terutama pada beberapa sektor seperti: politik, ekonomi dan juga keamanan. Dalam sistem internasional, konflik Ukraina membawa posisi dilematis kepada Jerman. Demi menjaga kekuatan Eropa Barat, Uni Eropa mendorong Jerman untuk memutuskan

sikap tegas untuk mendukung rakyat Ukraina pro-Barat. Hal tersebut disesuaikan dengan tujuan *European Neighborhood Policy*. Namun disisi lain, Jerman mempunyai hubungan kerjasama dengan Rusia yang sangat erat dalam hal sektor energi dan juga investasi industri. (Zetira Kenang Kania, 2014).

Jerman menjaga hubungannya dengan Rusia dengan terus menjalin kerjasama, bahkan untuk mendistribusikan gas alam dari Rusia langsung ke Jerman dengan menyetujui pembangunan jalur pipa gas *Nord Stream* tanpa melalui Ukraina (Zetira Kenang Kania, 2014). Pipa gas *Nord Stream* ini mempunyai rute yang terbentang melewati 3 negara, yaitu Finlandia, kemudian Swedia, dan juga Denmark hingga Jerman yang dihubungkan ke Perusahaan gas Rusia. Perusahaan pipa gas konsorsium yang diberi nama *Nord Stream AG* ini didominasi oleh kepemilikan Rusia dan juga Jerman. Dimana dalam pengoperasiannya terdiri dari Gazprom dengan saham 51% milik Rusia, Wintershall Holding dengan saham 15,5% milik Jerman, Gasunie dengan saham 9% milik Belanda, dan Engie dengan saham 9% milik Perancis. Pasokan energi gas ini menjadi penting untuk ekonomi Jerman, impor gas Rusia ke Jerman tercatat dari tahun 1971, dengan konsumsi gas yang terus meningkat dari 58 menjadi 76 MTOE (Aziz et al., 2021).

Setelah embargo diberlakukan, Jerman menerima ancaman keamanan sebagai dampak dari embargo yang dilakukan oleh Uni Eropa. Ketergantungan Jerman terhadap pasokan energi Rusia menjadikan Jerman tersandera saat akan mengeluarkan kebijakan yang terkait dengan Rusia. Jerman merasa khawatir di tengah gencatan embargo, karena Rusia adalah negara yang mempunyai peran penting bagi Jerman. Rusia sebagai pemasok energi melalui pipa gas alam yang disebut dengan *Nord Stream* (Aziz et al., 2021).

Dampak embargo ini terasa sangat signifikan bagi ekonomi Rusia, dan telah mempengaruhi hubungan bilateral antara Rusia dan Jerman, salah satu mitra perdagangan utama Rusia di Uni Eropa. Selain itu, embargo juga mempengaruhi sektor industri Jerman yang tergantung pada pasar Rusia. Banyak perusahaan Jerman yang telah berinvestasi di Rusia, terutama di sektor otomotif dan teknologi, dan mengalami kesulitan untuk mempertahankan kerjasama dengan mitra Rusia mereka setelah embargo diberlakukan. Hal ini mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Jerman secara keseluruhan dan memaksa perusahaan-perusahaan tersebut mencari pasar baru. Jerman merasa takut akan dampak dari aksinya melakukan embargo terhadap Rusia karena ketergantungan *supply* energi yang berasal dari Rusia (Kwiatkowska-drożdż & Popławski, 2014), dan hal tersebut dapat menghilangkan ancaman terhadap kestabilan di wilayah Eropa.

Jerman mengalami kesulitan untuk mendapatkan pasokan energi yang stabil dan terjangkau. Hal ini membuat Jerman mencari sumber energi alternatif dan mencoba untuk mengurangi ketergantungannya pada Rusia (Götz, 2007). Secara keseluruhan, embargo Uni Eropa terhadap Rusia telah mempengaruhi kerjasama bilateral antara Jerman dan Rusia, terutama dalam sektor energi dan industri. Namun, kedua negara masih mencoba untuk menjaga hubungan mereka dan mencari cara untuk mengatasi dampak embargo tersebut. Meskipun Jerman telah mencari alternatif lain dalam memenuhi kebutuhan energinya, namun bersikeras mempertimbangkan untuk menunda keputusan Nord Stream 2 (Constanze Stelzenmuller, 2022).

Penelitian terdahulu kasus yang sama yaitu terdapat dalam jurnal penelitian karya Mahfud Massaguni, Muhammad Nasir Badu, dan Muhammad Ashry Sallatu

yang berjudul “Pengaruh Sanksi Uni Eropa Terhadap Rusia Atas Krisis Ukraina” Penelitian tersebut lebih menekankan tinjauan atas dampak sanksi yang dijatuhkan Uni Eropa terhadap Rusia pada tahun 2014, sanksi tersebut memberikan dampak negatif bukan hanya bagi Rusia saja tetapi juga bagi Uni Eropa. Hasil penelitian ini lebih mengarah terhadap masing-masing pihak merupakan salah satu mitra dagang paling besar.

Penelitian ini belum pernah dilakukan karena prosesnya masih berlanjut, Penelitian ini memuat pemaparan analisis dampak dari embargo terhadap kerjasama Jerman-Rusia yang dilakukan oleh Uni Eropa kepada Rusia pada tahun 2022. Penelitian sebelumnya hanya pengaruh sanksi uni Eropa terhadap Rusia saja, sedangkan penelitian ini melihat dampak embargo terhadap kerjasama Jerman-Rusia yang dilakukan Uni Eropa, mengingat keduanya saling bergantung satu sama lain.

Maka berdasarkan latar belakang serta permasalahan yang telah dipaparkan, penulis mengangkat fenomena ini menjadi sebuah penelitian yang berjudul **DAMPAK EMBARGO UNI EROPA TERHADAP HUBUNGAN BILATERAL JERMAN-RUSIA.**

1.2. Perumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang dan identifikasi masalah yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut **“Bagaimana dampak embargo ekonomi Uni Eropa dapat mempengaruhi hubungan kerjasama bilateral Jerman-Rusia dalam sektor energi?”**

1.3. Pembatasan Masalah

Penulis perlu untuk membatasi masalah pada penelitian ini, maka batasan masalah dalam penelitian ini fokus pada analisa dampak embargo ekonomi Uni Eropa yang dijatuhkan kepada Rusia terhadap Kerjasama bilateral Jerman-Rusia, karena melakukan invasi militer ke Ukraina yang terjadi sejak Februari 2022-Januari 2023.

1.4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui alasan Uni Eropa menjatuhkan sanksi embargo kepada Rusia yang terjadi pada tahun 2022.
2. Untuk mengetahui tujuan embargo yang dijatuhkan Uni Eropa kepada Rusia.
3. Untuk memahami embargo Uni Eropa terhadap Rusia pada konflik Rusia-Ukraina.
4. Untuk memahami dampak embargo terhadap hubungan bilateral Jerman-Rusia.

1.4.2. Kegunaan Penelitian

1. Sebagai prasyarat kelulusan mata kuliah skripsi dalam program studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Pasundan.
2. Diharapkan agar bisa memberikan ilmu pengetahuan, wawasan, informasi kepada para pembacanya.
3. Sebagai tumpuan dan pertimbangan terhadap penelitian selanjutnya.
4. Diharapkan bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan.